



**RENCANA KERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang merupakan tahapan terakhir yang harus dilakukan untuk melakukan persiapan Penyesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini memuat kebijakan, rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang mengacu pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta kebutuhan anggaran pada program/kegiatan serta tugas dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan juga memperhatikan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dengan mempertimbangkan isu-isu penting tingkat global, regional, nasional dan daerah khususnya dalam bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sangat dibutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaannya. Akhirnya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini, semoga mendapat Ridha dari Allah SWT.

Aceh Besar, 04 Juli 2022 M
05 Dzulhijjah 1443 H

KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



H. Murni, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198403 1 028

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
SEKRETARIAT MPU ACEH TAHUN 2020	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat MPU Tahun 2021 dan Capaian Renstra 2017-2022	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat MPU Aceh	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat MPU Aceh	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA.....	20
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat MPU Aceh	24
3.3. Program dan Kegiatan.....	26
 BAB IV PENUTUP.....	 28

DAFTAR LAMPIRAN

- Tabel TC.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPA dan Pencapaian Renstra SKPA s.d Tahun 2021
- Tabel TC.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA
- Tabel TC.31. Rancangan Awal RKPA Tahun 2023
- Tabel TC.32. Usulan Program Dan Kegiatan dari Pada Pemangku Kepentingan/ Masyarakat Tahun 2023
- Tabel TC.33 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan RKPA Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

- + *Latar Belakang,*
- + *Landasan Hukum,*
- + *Maksud dan Tujuan*
- + *Sistematika Penulisan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan dan perundang-undangan saat ini, penyusunan rencana kerja dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana kerja yang sistematis, terpadu, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,

terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta konsisten dengan rencana lainnya yang relevan juga kepemilikan rencana menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Rencana Kerja SKPA mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja SKPA adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPA, Renstra SKPA, RPJMA dan bahkan RPJPA. Rencana Kerja SKPA berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja SKPA akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPA yang diberikan kepada masyarakat.

1.1.1.1. Renja Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan lembaga independen, berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Dalam menjalankan fungsinya MPU memiliki kewenangan dan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari'at Islam;
- b. Memberi fatwa, baik diminta maupun tidak diminta, terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi sesuai syari'at Islam;
- c. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang masalah keagamaan;
- d. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penulisan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam;
- e. Melakukan pengkaderan ulama.

Tujuan :

1. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.
2. Lahir kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang Islami.
3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Sasaran :

1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syari'at Islam.

2. Optimalisasi sumber daya dan peranan ulama dalam perumusan kebijakan daerah.
3. Pemantapan uhkawah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam beramar makruf dan nahi mungkar.

Kebijakan :

Menetapkan fatwa hukum syari'at, memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat, memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at dan memantau pelaksanaan agar tetap sesuai dengan syari'at.

Dalam kerangka inilah Sekretariat MPU menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran mendatang sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat MPU Aceh Tahun 2017 s/d 2022 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat MPU yang dijadikan acuan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
9. Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menetapkan Dokumen Perencanaan tahun 2023 yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2023 untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 ini, agar rumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang diselaraskan/sinergikan dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 dengan tema “Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif” yang mana Sekretariat MPU Aceh beserta Pimpinan dan anggota MPU dapat berperan serta dalam prioritas pembangunan tahun 2023 diantaranya yaitu Peningkatan sumber daya manusia berkualitas serta Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat MPU Aceh Tahun 2023 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat MPU Aceh Tahun 2023.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat MPU Aceh Tahun 2023.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menggambarkan telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja serta Program dan Kegiatan Sekretariat MPU Aceh Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun kemungkinan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

- ✚ *Evaluasi Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra*
 - ✚ *Analisis Kinerja Pelayanan,*
- ✚ *Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi*
 - ✚ *Review terhadap rancangan awal RKPA*

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT MPU ACEH TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Renstra
Sekretariat MPU Tahun 2017-2022**

Rencana Kerja Sekretariat MPU Aceh adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat MPU Aceh ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat MPU Aceh selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2023.

Adapun anggaran Tahun 2021 Sekretariat MPU Aceh sebesar Rp. 20.906.697.134-, dengan 2 (Dua) Program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Dari jumlah anggaran yang tersedia tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 18.100.288.207,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 86,6 % dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.1 REALISASI KEUANGAN 2021

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN	
		Rp		Rp	%
	SEKRETARIAT MPU ACEH	Rp 20.906.697.134		Rp 18.100.288.207	86,6
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp 12.685.989.061		Rp 10.931.522.864	86,2
1)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.918.553.804		Rp 5.250.582.476	88,7
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.918.553.804		Rp 5.250.582.476	88,7
2)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 305.147.400		Rp 295.439.900	96,8
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 305.147.400		Rp 295.439.900	96,8
3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.297.962.919		Rp 954.590.540	73,5
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 66.651.725		Rp 66.550.000	99,8
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 300.852.431		Rp 285.019.132	94,7
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 148.988.763		Rp 140.776.372	94,5
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Rp 50.400.000		Rp 50.400.000	100,0
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 731.070.000		Rp 411.845.036	56,3
4)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 329.781.379		Rp 302.408.375	91,7
8	Pengadaan Mebel	Rp 118.592.209		Rp 107.084.000	90,3
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 211.189.170		Rp 195.324.375	92,5
5)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.457.506.045		Rp 2.115.780.681	86,1
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 23.400.000		Rp 23.390.193	100,0
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 616.100.000		Rp 333.845.388	54,2
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.818.006.045		Rp 1.758.545.100	96,7
6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.377.037.514		Rp 2.012.720.892	84,7
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 670.420.000		Rp 491.623.835	73,3
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 417.856.571		Rp 409.340.710	98,0
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.288.760.943		Rp 1.111.756.347	86,3
II.	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Rp 8.220.708.073		Rp 7.168.765.343	87,2
7)	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Rp 6.950.417.246		Rp 6.139.491.820	88,3
16	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Rp 465.000.000		Rp 437.500.000	94,1
17	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Rp 4.648.683.878		Rp 4.124.265.975	88,7
18	Pendidikan Kader Ulama	Rp 599.660.237		Rp 409.923.696	68,4
19	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	Rp 99.966.933		Rp 96.693.000	96,7
20	Pengkajian Aliran Sempalan	Rp 236.146.198		Rp 211.484.515	89,6
21	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Rp 555.340.000		Rp 535.663.180	96,5
22	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Rp 226.950.000		Rp 205.369.000	90,5
23	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Rp 118.670.000		Rp 118.592.454	99,9
8)	Silaturahmi Ulama - Ulama	Rp 249.390.212		Rp 224.526.286	90,0
24	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Rp 249.390.212		Rp 224.526.286	90,0
9)	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	Rp 1.020.900.615		Rp 804.747.237	78,8
25	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	Rp 685.200.615		Rp 504.742.423	73,7
26	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Rp 262.400.000		Rp 258.932.114	98,7
27	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Rp 73.300.000		Rp 41.072.700	56,0

Untuk review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat MPU Aceh Tahun 2021 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel T.C.29 terlampir.

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan

Adapun realisasi program/kegiatan Sekretariat MPU Aceh yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan yaitu pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran Rp. 5.918.553.804,- realisasi sebesar Rp. 5.250.582.476,- atau 88,7 %.

2.1.2 Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan.

Adapun realisasi program/kegiatan Sekretariat MPU Aceh pada tahun 2021 yang memenuhi target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 305.147.400,- telah terealisasi sebesar Rp. 295.439.900,- atau 96,8 %, realisasi fisik sebesar 100 %.

2. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 329.781.379,- telah terealisasi sebesar Rp. 302.408.375,- atau 91,7 %.

3. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.457.506.045,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.115.780.681,- atau 86,1 %.

4. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.377.037.514,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.012.720.892,- atau 84,7 %.

5. Kegiatan peningkatan sumber daya peran ulama.

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.950.417.246,- telah terealisasi sebesar Rp. 6.139.491.820,- atau 88,3 %.

6. Kegiatan silaturahmi ulama-ulama.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 249.390.212,- telah terealisasi sebesar Rp.224.526.286,- atau 90 %.

7. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.020.900.615,- telah terealisasi sebesar Rp. 804.747.237,- atau 78.8 %

2.1.3 Realisasi Program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan.

Terdapat pada kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama dengan sub kegiatan **Sidang MPU Aceh.**

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program/kegiatan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat MPU Aceh sebagai berikut :

1. Masih berlakunya PPKM yang disebabkan oleh masih meningkatnya Pandemi Covid-19;
2. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra maupun dalam RPJMA dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat MPU Aceh dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Keagamaan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas serta kuantitas fatwa dan taushiah.
2. Meningkatnya jumlah sertifikat produk halal.
3. Tercapainya target yang ditetapkan untuk kegiatan Pendidikan Kader Ulama

2.1.6 Perkiraan Capaian Tahun 2022

Rencana Kerja yang telah ditetapkan Tahun 2022 pada Sekretariat MPU Aceh terdapat 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan serta 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 23.100.000.000,- dengan 2 (dua) jenis Belanja yaitu Belanja Operasi sebesar Rp. 22.004.971.123,- dan Belanja Modal Rp. 1.095.028.877,-. Diperkirakan dapat terlaksana dan terealisasi sebesar 92.6 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat MPU Aceh

2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja

Adapun Capaian sasaran strategis Sekretariat MPU Aceh pada Tahun 2021 yang akuntabilitasnya mencapai 100%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat MPU Aceh telah memenuhi target kinerja Sasaran Strategis Pertama dengan indikator meningkatnya jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam. Dalam pelaksanaan kegiatan MPU Aceh berhasil meningkatkan jumlah fatwa, keputusan, himbauan, taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam dimana target kuantitas Fatwa/Tausyiah sebanyak 7 dokumen dapat terealisasi sebanyak 12 dokumen, sebagai berikut :

PRODUK HUKUM TAHUN 2021			
No.	Nomor dan Tanggal Produk Hukum	Tentang	Jenis Produk Hukum
1	1 Tahun 2021 Tanggal 25 Februari 2021	Wakaf Tunai menurut Perspektif Hukum Islam	FATWA
2	2 Tahun 2021 Tanggal 24 Maret 2021	Pengurusan Tempat Usaha Masyarakat yang berada di atas tanah negara menurut Syariat Islam	FATWA
3	3 Tahun 2021 Tanggal 24 Juni 2021	Hukum Membela Masjidil Aqsa dan status Syahid dalam perspektif Syariat Islam	FATWA
4	4 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021	Pemimpin Muslim yang melegalkan Kemaksiatan menurut Hukum Islam	FATWA
5	5 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021	Pemindahan Kuburan Menurut Perspektif Hukum Islam	FATWA
6	6 Tahun 2021 Tanggal 10 November 2021	Rentenir Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat	FATWA
7	1 Tahun 2021 Tanggal 14 Januari 2021	Vaksinasi Covid -19 dengan Vaksin Sinovac Life Sciences Co.LTD dan PT. Bio Farma (Persero)	Tausyiah
8	2 Tahun 2021 Tanggal 25 Maret 2021	Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Kegiatan keagamaan lainnya Tahun 1442 H	Tausyiah
9	3 Tahun 2021 Tanggal 25 Maret 2021	Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	Tausyiah
10	4 Tahun 2021 Tanggal 10 Mei 2021	Pelaksanaan Ibadah Idul Fitri dan Kegiatan keagamaan lainnya Tahun 1442 H	Tausyiah
11	5 Tahun 2021 Tanggal 8 Juli 2021	Pelaksanaan Ibadah Idul Adha, Penjualan Hewan Qurban dan Kegiatan keagamaan lainnya Tahun 1442 H	Tausyiah
12	6 Tahun 2021 Tanggal 2 September 2021	Implementasi MOU Helsinki	Tausyiah

Tabel 2.2

Capaian Sasaran Strategis Pertama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	(%) Capaian
1	Meningkatnya Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh	Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	7 Dokumen	12 Dokumen	171%
Persentase rata-rata tingkat capaian					171%

Sasaran strategis Kedua yaitu meningkatnya Sertifikasi jaminan halal yang mana pada Tahun 2021 jumlah pemohon sertifikasi halal dari perusahaan mencapai 488 permohonan hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat halal untuk produk yang

dihasilkan. Peningkatan kesadaran ini tidak lepas dari sosialisasi pentingnya sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh dan Instansi terkait lainnya kepada masyarakat,

Dari jumlah permohonan tersebut dapat terlaksana audit sebanyak 365 perusahaan dikarenakan tahun 2021 masih mengalami masa pandemi covid-19 dan keterbatasan anggaran yang menghasilkan 191 sertifikasi dari target 250 halal dikarenakan auditi belum menyelesaikan perbaikan-perbaikan yg disarankan oleh auditor MPU Aceh dengan alasan audiditi masih mengalami keterbatasan anggaran untuk perbaikan.

Tabel 2.3

Capaian Sasaran Strategis Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	Jumlah sertifikat produk halal yang di hasilkan	184 Sertifikat	150 Sertifikat	189 Sertifikat
		Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	72 Orang	0 Orang	24 Orang

Sasaran Strategis kedua dengan indikator Jumlah Kader ulama yang ditingkatkan komptensinya dalam kehidupan masyarakat aceh, pencapaian sasaran strategis ini Pada tahun 2021 Penyelenggaraan Pendidikan Kader Ulama sebanyak 1 angkatan sebanyak 24 peserta dapat terpenuhinya semuanya.

2.2.2. Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum analisis kinerja pelayanan Sekretariat MPU Aceh, target yang ditetapkan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, telah dilaksanakan secara optimal.

Terdapat beberapa kegiatan yang tidak berlanjut dan rumusan indikator output dan outcome yang belum sempurna dirumuskan, sehingga bila dilakukan penghitungan persentase menjadi suatu kendala tersendiri. Secara lebih terperinci pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat MPU Aceh dapat lihat sebagaimana formulir T.C.30 terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang didalamnya mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, sehingga fungsi pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dapat terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi MPU dalam penetapan Program dan Kegiatan Prioritas sebagai :

1. Masih kurangnya Pemahaman terhadap aliran keagamaan yang bertentangan dengan Ahlul Sunnah

Wal Jamaah, maka perlu dilakukan Pembekalan Pencegahan Pendangkalan Aqidah.

2. Tidak tersampainya secara menyeluruh terhadap fatwa-fatwa dan tausyiah yang telah ditetapkan kepada masyarakat, maka diperlukan kegiatan Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam.
3. Masih kurangnya kader-kader ulama yang potensial baik itu dari kalangan laki-laki dan perempuan, maka diperlukan kegiatan Pendidikan Kader Ulama.
4. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi Halal pada produk makanan, obat-obatan dan kosmetika, maka untuk itu diperlukan sosialisasi sistem jaminan produk halal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Aceh RKPA Tahun 2023 dimaksudkan untuk memperoleh rumusan hasil analisis kebutuhan Program/Kegiatan pada Sekretariat MPU Aceh yang terdiri dari 2 (dua) Program serta 10 (sepuluh) Kegiatan. Yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

1. Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
2. Silaturahmi Ulama- Ulama
3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama

Review terhadap Rancangan Awal RKPA tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T.C. 31 terlampir.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- + *Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional*
- + *Tujuan dan Sasaran Renja*
- + *Program Kegiatan*

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Yang diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Yang terdiri dari :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional tersebut dan salahsatu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2025 adalah Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa, terdapat 4 (empat) kesesuaian yang menjadi tugas MPU Aceh, yaitu :

1. Menetapkan fatwa hukum syari'at;
2. Memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat;
3. Memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at;
4. Memantau pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan syari'at.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat MPU Aceh

3.2.1 Uraian tentang perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

➤ Tujuan Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja bertujuan untuk merumuskan kembali komitmen MPU Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan demi pencapaian sasaran yang telah tersedia dalam Renstra Sekretariat MPU Aceh Tahun 2017 – 2022, guna menentukan arah dalam penetapan prioritas program dan kegiatan tahun 2023 yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pengajuan anggaran yang berbasis kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja adalah untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023.

Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran/implementasi misi diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut berupa :

1. Meningkatnya peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan, nasehat, pendapat dan

saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

2. Meningkatnya kegiatan penetapan fatwa/hukum Syariat Islam.
3. Meningkatnya Sumber Daya dan Peran Ulama.
4. Meningkatnya pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkaran.
5. Meningkatnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat (pelaku usaha) dalam mengurus sertifikasi halal.

➤ Sasaran Rencana Kinerja

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat MPU Aceh juga mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu :

- a. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syari'at Islam dalam semua aspek kehidupan sehari-hari.
- b. Teroptimalisasinya sumber daya dan peranan ulama dalam perumusan kebijakan dan pembangunan daerah yang terkait dengan syariat islam.
- c. Pemantapan uhkwah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam beramar makruf dan nahi mungkar.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat MPU Aceh Tahun 2023 terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan Isu Strategis dan Arah kebijakan Pembangunan Aceh dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh serta mengacu pada evaluasi program/kegiatan Tahun 2021.

Dalam penyusunan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh didukung sepenuhnya oleh Pimpinan dan anggota MPU Aceh. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, adapun Program dan Kegiatan pada Sekretariat MPU Aceh Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	14. Pengadaan Mebel
	15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
II.	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH
1.	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
	19. Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama
	20. Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama
	21. Pendidikan Kader Ulama
	22. Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama
	23. Pengkajian Aliran Sempalan
	24. Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Penggandaannya
	25. Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama
	26. Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
	27. Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan
2.	Silaturahmi Ulama-Ulama
	28. Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah
3.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama
	29. Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal
	30. Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal
	31. Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal
	32. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal
	33. Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal

Dalam perencanaan Tahun 2023, Sekretariat MPU Aceh telah menetapkan Program/Kegiatan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam Peningkatan dan Peran Ulama di Aceh. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat MPU Aceh Tahun 2023 lebih detail dapat dilihat pada Tabel T.C.33 terlampir.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV**P E N U T U P**

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat MPU Aceh Tahun 2023 yang telah disusun merupakan penjabaran dari Renstra yang berisikan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif yang direncanakan guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan RKP tahun 2023 dengan Tema "Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif" agar dapat terlaksana secara optimal, sehingga memberikan dampak positif terhadap Peningkatan dan Peran Ulama Dalam Pembangunan Aceh dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Bidang Keistimewaan dan Kekhususan Aceh.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat MPU Aceh kami susun dan sampaikan, semoga dapat dijadikan sebagai bahan penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023.

Aceh Besar, 04 Juli 2022 M
05 Dzulhijjah 1443 H

KEPALA SEKRETARIAT
MAJLIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



H. Murni, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198403 1 028

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPA tahun 2023
Provinsi Aceh

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat MPU Aceh

Lembar.....dari.....

NO	Rancangan Awal RKPD					Kode		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN					9		UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN					
	KEKHUSUSAN ACEH				Rp 28.408.034.104	9	01	KEKHUSUSAN ACEH				Rp 17.472.693.000	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp 16.362.776.801	9	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp 9.847.921.595	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 575.983.908	9	01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 468.880.035	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aceh Besar	Renstra/Renja/RKA/DPA/RKA Revisi/DPA-Revisi/RKA-P/DPA-P	8 Dok	Rp 348.895.954	9	01 01 1.01 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aceh Besar	Renstra/Renja/RKA/DPA/RKA Revisi/DPA-Revisi/RKA-P/DPA-P	8 Dok	Rp 360.080.035	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Aceh Besar	LKj/LKPJ/ LPPA/Rekam Jejak/ Lap. Capaian Renja	5 Dok	Rp 227.087.954	9	01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Aceh Besar	LKj/LKPJ/ LPPA/Rekam Jejak/ Lap. Capaian Renja	5 Dok	Rp 108.800.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 6.223.219.977		01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 5.706.485.122	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Aceh Besar	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	41 Org	Rp 3.162.026.977	9	01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Aceh Besar	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	12 Bulan	Rp 5.706.485.122	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Aceh Besar	Betambahnya penghasilan ASN	12 Bln	Rp 3.061.193.000								
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 190.332.000	9	01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 178.332.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Aceh Besar	Tersedianya Pakaian PSL Pimpinan dan Anggota MPU	47 Org	Rp 190.332.000	9	01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Aceh Besar	Tersedianya Pakaian PSL Pimpinan dan Anggota MPU	47 Stel	Rp 178.332.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 1.365.400.000	9	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 716.567.174	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aceh Besar	Tersedianya Komponen Listrik	12 Bln	Rp 35.000.000	9	01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Aceh Besar	Tersedianya Komponen Listrik	12 Bln	Rp 25.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aceh Besar	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Makan Minum Rapat dan Pimpinan MPU	12 Bln	Rp 450.000.000	9	01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aceh Besar	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Makan Minum Rapat dan Pimpinan MPU	12 Bln	Rp 277.887.174	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aceh Besar	Barang Cetakan & Buku Agenda	12 Bln	Rp 130.000.000	9	01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aceh Besar	Barang Cetakan & Buku Agenda	12 Bln	Rp 74.800.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)						Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aceh Besar	Surat Kabar/Majalah	12 Bln	Rp 50.400.000		01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aceh Besar	Surat Kabar/Majalah	12 Bln	Rp 25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaraya Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	Rp 700.000.000		01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaraya Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	Rp 313.880.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 963.692.582		01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 489.283.264	
	Pengadaan Mebel	Aceh Besar	Tersedianya Mobiler Kantor	1 Paket	Rp 500.000.000	9	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Aceh Besar	Tersedianya Mobiler Kantor	1 Paket	Rp 93.497.040	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aceh Besar	Tersedianya Perlengkapan Kantor & Peralatan Gedung Kantor	12 Bln	Rp 463.692.582	9	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aceh Besar	Tersedianya Perlengkapan Kantor & Peralatan Gedung Kantor	12 Bln	Rp 395.786.224	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 2.442.500.000	9	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 1.343.074.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh Besar	Biaya Pengiriman dan Materai	12 Bln	Rp 11.500.000	9	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh Besar	Biaya Pengiriman dan Materai	12 Bln	Rp 11.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aceh Besar	Terbayarnya Rekening Listrik/Air/Internet	12 Bln	Rp 616.100.000	9	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aceh Besar	Terbayarnya Rekening Listrik/Air/Internet	12 Bln	Rp 400.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aceh Besar	Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum dan Pendukung Lainnya	12 Bln	Rp 1.814.900.000	9	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aceh Besar	Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum dan Pendukung Lainnya	12 Bln	Rp 931.574.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 4.601.648.334		XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 945.300.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aceh Besar	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Pajak	21 Unit	Rp 600.420.000	X	XX	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aceh Besar	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Pajak	21 Unit	Rp 550.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Aceh Besar	Terehabnya Gedung Kantor	1 Unit	Rp 3.510.896.334	X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Aceh Besar	Terehabnya Gedung Kantor	1 Unit	Rp 245.300.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aceh Besar	Terpelihara dan Terehabnya Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan gedung Lainnya	12 Bln	Rp 490.332.000	X	XX	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aceh Besar	Terpelihara dan Terehabnya Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan gedung Lainnya	12 Bln	Rp 150.000.000	

	Rancangan Awal RKPD					Kode				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH				Rp 12.045.257.303	9	01	03		PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH				Rp 7.624.771.405	
	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama				Rp 9.297.208.730	9	01	03	1.01	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama				Rp 6.630.224.103	
	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Aceh Besar	Terlaksanannya Kegiatan dan Pembinaan Badan Otonom	12 Bln	Rp 720.000.000	9	01	03	1.01 01	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Aceh Besar	Terlaksanannya Kegiatan dan Pembinaan Badan Otonom	12 Bln	Rp 502.691.868	
	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Aceh Besar	Terlaksananya sidang MPU dan Rapat Komisi	8 Kali	Rp 5.000.000.000	9	01	03	1.01 02	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Aceh Besar	Terlaksananya sidang MPU dan Rapat Komisi	6 Kali	Rp 4.342.699.629	
	Pendidikan Kader Ulama	Aceh Besar	Terlatihnya Kader Ulama	3 Kali	Rp 1.550.000.000	9	01	03	1.01 03	Pendidikan Kader Ulama	Aceh Besar	Terlatihnya Kader Ulama	2 Kali	Rp 792.669.450	
	Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Aceh	Terlaksananya Rakor MPU	2 Kali	Rp 150.000.000	9	01	03	1.01 04	Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Aceh	Terlaksananya Rakor MPU	2 Kali	Rp 120.000.000	
	Pengkajian Aliran Sempalan	Aceh	Terlaksananya kajian aliran sempalan dan pembekalan pencegahan pendangkalan aqidah	4 Kali	Rp 377.000.000	9	01	03	1.01 06	Pengkajian Aliran Sempalan	Aceh	Terlaksananya kajian aliran sempalan dan pembekalan pencegahan pendangkalan aqidah	2 Kali	Rp 194.630.548	
	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Penggandaannya	Aceh Besar	Tersedianya terjemahan Kitab dalam bahasa Indonesia	2 Kitab	Rp 100.000.000	9	01	03	1.01 07	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Penggandaannya	Aceh Besar	Tersedianya terjemahan Kitab dalam bahasa Indonesia	1 Kitab	Rp 50.000.000	
	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Aceh	Peningkatan Informasi dan Publikasi	12 Bln	Rp 932.056.750	9	01	03	1.01 09	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Aceh	Peningkatan Informasi dan Publikasi	12 Bln	Rp 350.224.476	
	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Aceh	Tersosialisasi Informasi mengenai Kepastian Hukum dan Fatwa	3 Kali	Rp 317.719.980	9	01	03	1.01 11	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Aceh	Tersosialisasi Informasi mengenai Kepastian Hukum dan Fatwa	2 Kali	Rp 197.308.132	
	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Aceh	Terevaluasinya keserasian pelaksanaan pembangunan	12 Bln	Rp 150.432.000	9	01	03	1.01 12	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Aceh	Terevaluasinya keserasian pelaksanaan pembangunan	12 Bln	Rp 80.000.000	
	Silaturahmi Ulama-Ulama				Rp 400.000.000	9	01	03	1.02	Silaturahmi Ulama-Ulama				Rp 158.237.302	
	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Aceh	Peningkatan Kapasitas Ulama dan Umara Kab/Kota	4 kali	Rp 400.000.000	9	01	03	1.02 02	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Aceh	Peningkatan Kapasitas Ulama dan Umara Kab/Kota	2 kali	Rp 158.237.302	

	Rancangan Awal RKPD					Kode				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama				Rp 2.348.048.573	9	01	03	1.03	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama				Rp 836.310.000		
	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	Aceh	Peningkatan Pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal bagi pembina, penyelia halal dan pelaku usaha	6 Kali	Rp 400.000.000	9	01	03	1.03	01	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	Aceh	Peningkatan Pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal bagi pembina, penyelia halal dan pelaku usaha	2 Kali	Rp 200.000.000	
	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Aceh	Peningkatan Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Sertifikat Halal	220 UKM	Rp 1.500.000.000	9	01	03	1.03	02	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Aceh	Peningkatan Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Sertifikat Halal	200 UKM	Rp 436.310.000	
	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	Aceh	Sinkronisasi Program dan Kinerja Instansi terkait	2 Kali	Rp 98.026.132	9	01	03	1.03	03	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	Aceh	Sinkronisasi Program dan Kinerja Instansi terkait	2 Kali	Rp 50.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal	Aceh Besar	Tersedianya alat dan bahan laboratorium	12 Bln	Rp 100.022.441	9	01	03	1.03	04	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal	Aceh Besar	Tersedianya alat dan bahan laboratorium	12 Bln	Rp 50.000.000	
	Sosialisasi Sertifikasi Produk HalaL	Aceh	Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang produk halal	2 Kali	Rp 250.000.000	9	01	03	1.03	05	Sosialisasi Sertifikasi Produk HalaL	Aceh	Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang produk halal	2 Kali	Rp 100.000.000	

Banda Aceh, 03 Juli 2022

KEPALA SEKRETARIAT
MADYAS PERSAWARATAN ULAMA ACEH


H. Murni, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198403 1 028

TABEL T.C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT MPU ACEH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
9					UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN													
9	1				KEKHUSUSAN ACEH								Rp	17.472.693.000				41.021.492.464
9	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								Rp	9.847.921.595				18.419.247.892
9	1	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Rp	468.880.035				550.000.000
9	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Renstra/Renja/RKA/DPA/RK A Revisi/DPA-Revisi/RKA-P/DPA-P	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkue	100 %	8 Dokumen	12 Bulan	Rp	360.080.035	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100 %	330.000.000
9	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	LKJ/LKPI/ LPPA/Rekam Jejak/ Lap. Capaian Renja	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkue	100 %	5 Dokumen	12 Bulan	Rp	108.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100 %	220.000.000
9	1	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Rp	5.706.485.122				7.524.450.103
9	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan tunjangan PNS	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp	5.706.485.122	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	7.524.450.103
9	1	1	1,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								Rp	178.332.000				369.228.354
9	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Tersedianya Pakaian PSL Pimpinan dan Anggota MPU	Tersedianya PSL untuk Pimpinan dan Anggota MPU	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	100 %	47 Stel	48 Orang	Rp	178.332.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut	100 %	369.228.354
9	1	1	1,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah								Rp	716.567.174				1.595.771.729
9	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Komponen Listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	80.648.587
9	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Makan Minum Rapat dan Pimpinan MPU	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp	277.887.174	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	364.031.442
9	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Barang Cetakan & Buku Agenda	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp	74.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	205.513.000
9	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	60.984.000
9	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaraya Rapat- Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp	313.880.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	884.594.700
9	1	1	1,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Rp	489.283.264				2.530.000.000
9	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Mobiler Kantor	Tersedianya Perlengkapan Pendukung Kerja Aparatur	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	100 %	1 Tahun	12 Bulan	Rp	93.497.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1.100.000.000
9	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Perlengkapan Kantor & Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Pendukung Kerja Aparatur	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp	395.786.224	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1.430.000.000
9	1	1	1,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Rp	1.343.074.000				2.973.582.314

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
9	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Biaya Pengiriman dan Materi	Tersedianya jasa aparatur dan terbayarnya air listrik dan internet	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp 11.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	28,314,000
9	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Terbayarnya Rekening Listrik/Air/Internet	Tersedianya jasa aparatur dan terbayarnya air listrik dan internet	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp 400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	745,481,000
9	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum dan Pendukung Lainnya	Tersedianya jasa aparatur dan terbayarnya air listrik dan internet	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp 931.574.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	2,199,787,314
9	1	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Rp 945.300.000				2,876,215,392	
9	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Pajak	Terciptanya Kenyamanan dalam Pelaksanaan Tugas	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkue	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp 550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	811,208,200
9	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Terpelihara dan Terehabnya Gedung Kantor	Terciptanya Kenyamanan dalam Pelaksanaan Tugas	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp 245.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	505,606,451
9	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Terpelihara dan Terehabnya Sarana & Prasarana	Terciptanya Kenyamanan dalam Pelaksanaan Tugas	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Tingkue	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp 150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	1,559,400,741
9	1	3			PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH								Rp 7.624.771.405				22,602,244,572	
9	1	3	1		Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama								Rp 6.630.224.103				10,332,244,572	
9	01	03	1.01	01	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Terlaksananya Rapat-rapat & Pembinaan Badan Otonom	Persentase Kesadaran dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	99 %	12 Bulan	90 Persen	Rp 502.691.868	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	1,408,000,000
9	01	03	1.01	02	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Terlaksananya sidang MPU, Musda dan Komisi-komisi	Persentase Kesadaran dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	99 %	6 Kali	90 Persen	Rp 4.342.699.629	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	5,100,000,000
9	01	03	1.01	03	Pendidikan Kader Ulama	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Terlathnya Kader Ulama	Persentase Kesadaran dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	99 %	2 Angkatan	90 Persen	Rp 792.669.450	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	1,200,000,000
9	01	03	1.01	04	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Terjalinnnya Koordinasi dan Persamaan Persepsi MPU Kab/Kota	Persentase Kesadaran dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua	99 %	2 Kali	90 Persen	Rp 120.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	275,000,000
9	01	03	1.01	06	Pengkajian Aliran Sempalan	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Terdatnya aliran sempalan	Persentase Kesadaran dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua	99 %	2 Kali	90 Persen	Rp 194.630.548	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	531,244,572
9	01	03	1.01	07	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Tersedianya terjemahan Kitab dalam bahasa Indonesia	Persentase Kesadaran dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua	99 %	1 Kitab	90 Persen	Rp 50.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	40,000,000
9	01	03	1.01	09	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan Informasi dan Publikasi	Persentase Kesadaran dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua	99 %	12 Bulan	90 Persen	Rp 350.224.476	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	500,000,000
9	01	03	1.01	11	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Tersosialisasi Informasi mengenai Kepastian Hukum dan Fatwa	Persentase Kesadaran dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua	99 %	2 Kali	90 Persen	Rp 197.308.132	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	908,000,000
9	01	03	1.01	12	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Perananan Ulama dalam Pembangunan Keagamaan di Kab/Kota	Persentase Kesadaran dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua	99 %	1 Tahun	90 Persen	Rp 80.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	370,000,000
9	1	3	1		Silaturahmi Ulama- Ulama								Rp 158.237.302				770,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
9	01	03	1.02	02	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan Kerjasama Ulama dan Umara Kab/Kota	Terpenuhinya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi ulama	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	99 %	2 Kali	90 Persen	Rp 158.237.302	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	770.000.000
9	1	3	1		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama								Rp 836.310.000				11.500.000.000	
9	01	03	1.03	01	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan Pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal	Terlaksananya sosialisasi dan penerbitan sertifikasi produk halal	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	99 %	2 Kali	12 Bulan	Rp 200.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	3.000.000.000
9	01	03	1.03	02	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan Audit Jumlah Produsen yang mendapatkan Sertikat Halal	Terlaksananya sosialisasi dan penerbitan sertifikasi produk halal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	99 %	220 UKM	12 Bulan	Rp 436.310.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	2.000.000.000
9	01	03	1.03	03	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Singkronisasi Program dan Kinerja	Terlaksananya sosialisasi dan penerbitan sertifikasi produk halal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	99 %	2 kali	12 Bulan	Rp 50.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	2.000.000.000
9	01	03	1.03	04	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan Alat dan Bahan Pendukung Lab Halal	Terlaksananya sosialisasi dan penerbitan sertifikasi produk halal	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah,	99 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp 50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	3.000.000.000
9	01	03	1.03	05	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya Pemahaman sertifikat produk halal	Terlaksananya sosialisasi dan penerbitan sertifikasi produk halal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	99 %	2 Kali	12 Bulan	Rp 100.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99 %	1.500.000.000
TOTAL													Rp 17.472.693.000				41.021.492.464	